



Strategi Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk

Ika Asrinopiyaningsi¹, Rozzy Aprirachman²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Teknologi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: rozzy.aprirachman@uts.ac.id

Diterima: 26-12-2025 | Disetujui: 06-01-2026 | Diterbitkan: 08-01-2026

ABSTRACT

Village development is a crucial sector in accelerating local economic growth, expanding employment opportunities, and improving community welfare. Lunyuk Rea Village, as a recipient of Village Funds, has significant potential for development. However, the implementation of its development programs still faces various challenges, such as suboptimal staff capacity, limited planning data, low transparency, and suboptimal community participation. This study aims to analyze priority strategies for the use of Village Funds in Lunyuk Rea Village, Lunyuk District, using the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method. The study used a quantitative descriptive approach through questionnaires distributed to the community and stakeholders, and data analysis using the IFE, EFE, SWOT, and QSPM matrices. Based on the QSPM results, three strategies with the highest Total Attractiveness Score (TAS) values, namely SO2, SO1, and ST1, were identified as the top priorities for improving the effectiveness of Village Fund management. These three strategies are considered the most relevant for strengthening village governance, increasing economic independence, and promoting transparency and accountability. The implementation of these strategies is expected to sustainably improve the quality of development and community welfare in Lunyuk Rea Village.

Keywords: Village Fund; SWOT; QSPM; Priority Strategy.

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan sektor penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Lunyuk Rea sebagai salah satu penerima Dana Desa memiliki potensi besar untuk berkembang, namun implementasi program pembangunannya masih menghadapi berbagai persoalan, seperti kapasitas aparatur yang belum optimal, keterbatasan data perencanaan, rendahnya transparansi, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk dengan memanfaatkan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta analisis data menggunakan matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSPM. Berdasarkan hasil QSPM, diperoleh tiga strategi dengan nilai Total Attractiveness Score (TAS) tertinggi, yaitu strategi SO2, SO1, dan ST1, yang menjadi prioritas utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Ketiga strategi tersebut dipandang paling relevan dalam memperkuat tata kelola desa, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Implementasi strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lunyuk Rea secara berkelanjutan.

Katakunci: Dana Desa; SWOT; QSPM; Strategi Prioritas.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Asrinopiyaningsi, I., & Aprirachman, R. (2026). Strategi Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(1), 152-171. <https://doi.org/10.63822/cshrp943>

PENDAHULUAN

Dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa setiap kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diarahkan dengan lebih baik. Desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dalam masyarakat sehingga permasalahan seperti kemiskinan dan masalah sosial dapat diatasi dengan semaksimal mungkin. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya yang dimiliki termasuk Pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa.

Desa merupakan sebuah pemerintahan kecil yang dikepalai oleh kepala Desa yang telah diakui dalam Undang – Undang No.6 Tahun 2014. Salah satu sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Alokasi Dana Desa diberikan setiap tahun kepada setiap desa dalam jumlah tertentu untuk menjalankan program-program yang telah dibuat sebelumnya dengan

Menurut Widjaja (2015), Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Konsep ini dikenal dengan istilah otonomi Desa yang asli, bulat, dan utuh, yang menegaskan bahwa desa bukan sekedar perpanjangan tangan Pemerintah di atasnya, tetapi entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan serta sumber daya lokalnya. Dalam konteks Penggunaan Dana Desa, pandangan Widjaja menunjukkan bahwa strategi prioritas yang disusun oleh pemerintah desa seharusnya berlandaskan pada prinsip otonomi tersebut, yakni dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat melalui perencanaan partisipatif, pemanfaatan potensi lokal, dan pengelolaan keuangan Desa yang transparan serta Akuntabel. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi penggunaan dana desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan semangat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diamanatkan dalam konsep otonomi Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa yang akan disalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dimana penggunaan Dana Desa dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sehingga pemerintahan Desa dapat digunakan Dana tersebut sebaik- baik mungkin. Alokasi Dana Desa berasal dari pembagian hasil pajak daerah serta dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Kabupaten Sumbawa, sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah pedesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di kabupaten sumbawa mencapai 14,5%, lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB yang sebesar 12,8% (BPS, 2023).

Sebelum pemerintahan menyalurkan Dana, pemerintahan Desa seharusnya membuat terlebih dahulu rancangan anggaran pendapatan belanja Desa (RAPBDes) dengan melibatkan semua masyarakat Desa dalam menentukan RAPBDes tersebut. Dana Desa akan disalurkan jika pemerintahan Desa telah melakukan pemindah bukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa dengan syarat APBDes telah ditetapkan.

Strategi prioritas penggunaan Dana Desa menjadi krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Penelitian ini relevan karena data terbaru menunjukkan bahwa hanya 60% desa di NTB yang berhasil mencapai target prioritas pembangunan pada Tahun 2022, dengan faktor utama adalah kurangnya perencanaan strategis (Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Oleh karena itu, analisis strategi prioritas di Desa Lunyuk Rea diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif di tingkat lokal.

Asas penggunaan keuangan Desa dalam peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman penggunaan keuangan Desa pasal 2 menyatakan bahwa keuangan Desa digunakan berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran untuk alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa cukup besar sehingga sangat dibutuhkan untuk melakukan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang ketat.

Berdasarkan Informasi Dari Bapak Ihwan selaku Sekretaris Desa, Permasalahan dalam strategi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan penentuan prioritas yang masih terkendala, kurangnya data yang akurat dan musyawarah desa yang belum sepenuhnya partisipatif sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan kebutuhan mendesak, hingga keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dalam memahami regulasi, perencanaan, serta pengelolaan keuangan. Penggunaan dana masih cenderung terfokus pada pembangunan infrastruktur bidang pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta program inovatif bagi pengentasan kemiskinan, perempuan, dan pemuda belum optimal. Desa Lunyuk Rea merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang terletak dibagian selatan dengan luas wilayah 89,45 km². Desa Lunyuk Rea terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Sukajaya, Dusun Plara, Dusun Jelpang, dan Dusun Lunyuk Rea. Anggaran dari Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Lunyuk Rea dari Tahun 2021-2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Penggunaan Dana Desa di Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Tahun 2021-2025

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Dana Desa	Bagi hasil pajak	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan Desa
2021	10.000.000	920.250.000	34.250.000	647.451.000	0	1.612.235.800
2022	10.000.000	924.616.000	37.370.000	634.232.000	0	1.651.818.000
2023	5.000.000	1.216.800.000	82.077.700	657.321.000	0	1.981.198.700
2024	5.000.000	1.213.890.000	82.077.700	671.437.000	0	1.972.404.000
2025	10.000.000	1.409.216.000	187.662.800	1.289.426.800	0	2.891.305.600

Sumber: Laporan Dana Desa Lunyuk Rea Tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa struktur pendapatan Desa Lunyuk Rea selama periode Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sumber utama pendapatan Desa masi didominasi oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan desa. Peningkatan total pendapatan dari Rp1.612.235.800 pada tahun 2021 menjadi Rp2.891.305.600 pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal desa serta dukungan kuat dari pemerintah pusat.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program Dana Desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program Dana Desa tersebut, hal itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai strategi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Lunyuk Rea berdasarkan persepsi masyarakat dan perangkat desa. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan fenomena yang terjadi tanpa manipulasi variabel, sedangkan pendekatan kuantitatif

diterapkan karena data yang dikumpulkan berupa angka dari hasil penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengukur tingkat kesesuaian program, partisipasi warga, serta transparansi dan efektivitas pelaksanaan Dana Desa di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, dengan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan utama terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Bendahara Desa, sementara responden masyarakat diambil sebanyak 60 orang yang tersebar di empat dusun (Lunyuk Rea, Sukajaya, Jelapang, dan Plara) dengan metode strata untuk keterwakilan setiap wilayah.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi partisipasi, dan kuesioner, serta data sekunder berupa dokumen resmi desa (Indriantoro, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui observasi sebagai dasar ilmu pengetahuan untuk menangkap fakta kenyataan (Nasution, 1988), wawancara terstruktur dengan aparat desa, serta dokumentasi untuk menelaah laporan realisasi anggaran. Selain itu, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pengumpulan, hingga analisis data untuk menjamin validitas hasil penelitian (Moleong, 2012).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, diawali dengan penggunaan Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor Evaluation) untuk memberi bobot dan peringkat pada kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman desa. Tahap selanjutnya adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk merumuskan berbagai alternatif strategi, seperti strategi SO untuk memanfaatkan kekuatan dalam menangkap peluang, serta strategi WT untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman eksternal yang dapat menghambat pembangunan desa.

Tahap akhir dari analisis ini adalah penggunaan Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) untuk mengevaluasi pilihan strategis secara objektif berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal (David, 2020). QSPM berfungsi sebagai alat analisis untuk menentukan strategi terbaik di antara berbagai alternatif yang ada dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan kunci (Ahmad Turmudi Zy et al, 2021). Dengan menghitung Total Attractiveness Score (TAS), peneliti dapat menetapkan urutan prioritas strategi yang paling menarik dan layak untuk diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa (Laksmi & Zunaidi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor Strategi (Analisis faktor internal dan eksternal (IFAS-EFAS))

a. Internal Strategic Faktor Analysis Summary (IFAS)

Tabel 2. IFAS

No	Indikator Faktor Kekuatan	Bobot	Rating	Score
1.	Pemerintah Desa memiliki dasar hukum yang kuat	0.11	4.12	0.45
2.	Dukungan pemerintah pusat & daerah	0.11	4.20	0.47
3.	Dana Desa dialokasikan sesuai kebutuhan	0.10	3.92	0.41
4.	Partisipasi masyarakat cukup tinggi	0.10	3.87	0.40
5.	Pemanfaatan SDA desa sudah optimal	0.09	3.42	0.31
Total Faktor Kekuatan		0.52	3.90	2.04
No	Indikator Faktor Kelemahan	Bobot	Rating	Score

1.	Aparatur desa kurang memahami regulasi	0.09	3.47	0.32
2.	Pengawasan Dana Desa masih lemah	0.10	3.80	0.39
3.	Masyarakat jarang dilibatkan musrenbang	0.09	3.52	0.33
4.	Transparansi keuangan desa rendah	0.10	3.62	0.35
5.	Data & laporan belum akurat	0.09	3.43	0.32
Total Faktor Kelemahan		0.48	3.57	1.70
Total Faktor Internal				3.74

Sumber; Data diolah, 2025

Matriks IFAS merupakan instrumen evaluasi strategis yang digunakan untuk menilai efektivitas kekuatan internal serta mengidentifikasi kelemahan yang memengaruhi pengelolaan Dana Desa. Berikut adalah penjelasan naratif bagi setiap indikator faktor kekuatan dan kelemahan:

- 1) Dasar Hukum Pemerintah Desa yang Kuat Kekuatan fundamental dalam tata kelola desa didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Faktor ini memiliki bobot 0,11, yang mengindikasikan bahwa dasar hukum merupakan elemen krusial dalam mendukung seluruh operasional pengelolaan Dana Desa. Dengan perolehan *rating* sebesar 4,12, pemerintah desa dinilai telah mengimplementasikan kerangka hukum secara sangat efektif dan konsisten. Hal ini menghasilkan skor akhir sebesar 0,45, yang mencerminkan kontribusi positif yang signifikan terhadap stabilitas dan legitimasi kekuatan internal institusi desa.
- 2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi antara level pemerintahan merupakan pilar utama dalam keberhasilan program pembangunan di tingkat lokal. Faktor ini memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan aspek legalitas, ditunjukkan dengan bobot 0,11. Perolehan *rating* tertinggi sebesar 4,20 menegaskan bahwa dukungan administratif maupun pendampingan teknis dari pemerintah pusat dan daerah terjalin dengan sangat kuat. Skor sebesar 0,47 menempatkan faktor ini sebagai kekuatan dominan dalam matriks internal, yang menjadi katalisator bagi akselerasi pembangunan desa.
- 3) Alokasi Dana Desa yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Pengalokasian sumber daya keuangan yang selaras dengan aspirasi publik merupakan instrumen optimalisasi pembangunan. Dengan bobot sebesar 0,10, faktor ini dianggap sebagai aspek penting dalam perencanaan strategis. *Rating* sebesar 3,92 menunjukkan bahwa mekanisme alokasi dana telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi. Kontribusi skor sebesar 0,41 membuktikan bahwa ketepatan sasaran alokasi dana memberikan dampak nyata terhadap efektivitas perencanaan jangka menengah desa.
- 4) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Keterlibatan aktif warga merupakan manifestasi dari modal sosial yang memperkuat kapasitas internal desa. Faktor partisipasi masyarakat memiliki bobot 0,10, yang menandakan urgensinya dalam menjamin keberlanjutan setiap program. *Rating* sebesar 3,87 berada pada kategori baik, mencerminkan adanya keterlibatan kolektif warga dalam proses pembangunan. Skor sebesar 0,40 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh substansial dalam memperkuat kemandirian dan daya dukung internal terhadap program-program pemerintah desa.
- 5) Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa Pengelolaan potensi alam lokal merupakan faktor pendukung dalam struktur ekonomi desa. Meskipun memiliki bobot kepentingan yang lebih moderat sebesar 0,09, pemanfaatan SDA tetap menjadi aset strategis yang relevan.

Perolehan *rating* sebesar 3,42 mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya alam saat ini sudah berada dalam kondisi yang cukup memadai, namun memerlukan langkah-langkah peningkatan kualitas lebih lanjut. Skor sebesar 0,31 memberikan kontribusi sedang dalam memperkaya portofolio kekuatan internal desa secara keseluruhan.

- 6) Kapasitas Aparatur Desa terhadap Pemahaman Regulasi Literasi regulasi di kalangan birokrasi desa menjadi variabel penting yang memengaruhi kinerja organisasi. Kelemahan ini memiliki bobot 0,09, yang menunjukkan pengaruh moderat terhadap hambatan kinerja operasional. *Rating* sebesar 3,47 mengonfirmasi bahwa keterbatasan pemahaman aparatur terhadap regulasi teknis merupakan masalah nyata yang memerlukan intervensi serius melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Skor sebesar 0,32 mencerminkan besarnya dampak negatif kelemahan ini terhadap profesionalisme pelayanan publik desa.
- 7) Sistem Pengawasan Dana Desa yang Belum Optimal Mekanisme kontrol internal merupakan aspek vital dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan dana publik. Dengan bobot sebesar 0,10, pengawasan menjadi variabel yang sangat menentukan integritas sistem. *Rating* sebesar 3,80 memperlihatkan bahwa kelemahan dalam aspek pengawasan sangat menonjol dan sering kali menjadi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan program. Skor sebesar 0,39 menjadikan faktor ini sebagai kelemahan dominan yang memerlukan prioritas perbaikan segera guna mencegah inefisiensi anggaran.
- 8) Rendahnya Inklusivitas Masyarakat dalam Musrenbang Demokrasi partisipatif dalam perencanaan pembangunan sering kali terhambat oleh minimnya pelibatan publik. Faktor ini memiliki bobot kepentingan sedang sebesar 0,09. Perolehan *rating* sebesar 3,52 menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi kendala struktural yang signifikan. Skor sebesar 0,33 mengindikasikan adanya korelasi kuat antara rendahnya partisipasi dalam perencanaan dengan penurunan kualitas objektivitas program pembangunan yang dihasilkan.
- 9) Transparansi Tata Kelola Keuangan Desa Aspek transparansi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*). Faktor ini memiliki bobot tinggi sebesar 0,10, yang menandakan perannya sebagai standar etika pemerintahan desa. *Rating* sebesar 3,62 mengonfirmasi adanya kelemahan kuat dalam keterbukaan akses informasi keuangan bagi warga. Skor sebesar 0,35 menunjukkan bahwa rendahnya transparansi berkontribusi besar terhadap potensi gesekan sosial dan penurunan citra positif pemerintah desa di mata masyarakat.
- 10) Akurasi Pengelolaan Data dan Pelaporan Ketepatan data administratif merupakan fondasi dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Faktor ini memiliki bobot kepentingan moderat sebesar 0,09. Perolehan *rating* sebesar 3,43 mengindikasikan bahwa data dan laporan yang belum akurat sering kali mengganggu ketepatan penyusunan program pembangunan. Skor sebesar 0,32 mencerminkan dampak signifikan dari kelemahan administratif ini terhadap kredibilitas dan kualitas manajemen informasi di lingkungan pemerintah desa.

Tabel 3. Kriteria Skor IFAS dan EFAS

Uraian	Bobot Skor		
	Rendah	Sedang	Tinggi
IFAS	1,00 – 2,00	2,1 – 3, 00	3,1 – 4, 00
EFAS	1,00 – 2,00	2,1 – 3, 00	3,1 – 4, 00

Sumber; Data diolah, 2025

Analisis strategis menggunakan matriks IFAS dan EFAS memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi internal dan eksternal suatu objek penelitian. Matriks IFAS mengevaluasi faktor internal, yakni kekuatan dan kelemahan, dengan memberikan bobot dan rating pada setiap faktor. Hasil akhir analisis IFAS berupa skor total, di mana dalam penelitian ini diperoleh skor 3,74. Skor ini masuk dalam kategori tinggi (3,1–4,00), yang mengindikasikan bahwa faktor internal objek penelitian sangat kuat dan mendukung pengembangan. Dominasi kekuatan atas kelemahan menciptakan landasan internal yang solid untuk keberhasilan pengelolaan.

Secara paralel, matriks EFAS menganalisis faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Metode penilaian yang sama diterapkan, dan diperoleh skor total EFAS sebesar 3,88. Skor ini juga berada pada kategori tinggi, menunjukkan bahwa lingkungan eksternal didominasi oleh peluang yang sangat besar dibandingkan ancaman. Kondisi eksternal yang demikian mendukung dan kondusif memberikan ruang yang luas bagi objek penelitian untuk dioptimalkan, baik melalui adaptasi terhadap tren, pemanfaatan kebijakan, maupun pengembangan program.

Dengan skor IFAS dan EFAS yang sama-sama tinggi, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian ini memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Konvergensi antara kondisi internal yang kuat dan lingkungan eksternal yang mendukung menempatkan objek penelitian pada posisi yang strategis. Implikasinya, strategi yang paling tepat untuk diadopsi adalah strategi pertumbuhan agresif dan pengembangan yang berkelanjutan guna memaksimalkan daya tarik serta meningkatkan daya saing objek penelitian tersebut secara keseluruhan (Maradita & Aprirachman, 2023).

b. *External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)*

Tabel 4. EFAS

No	Indikator Faktor Peluang	Bobot	Rating	Score
1.	Pemerintah pusat memberikan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa.	0.10	3.95	0.40
2.	Pengembangan BUMDes dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa.	0.11	4.18	0.45
3.	Teknologi informasi (Siskeudes) membantu transparansi keuangan desa.	0.09	3.63	0.34
4.	Potensi ekonomi lokal (pertanian, perikanan) mendukung kesejahteraan masyarakat.	0.10	4.00	0.41
5.	Dukungan masyarakat terhadap program Dana Desa cukup tinggi.	0.10	4.02	0.42
Total Faktor Peluang		0.51	3.96	2.02
No	Indikator Faktor Ancaman	Bobot	Rating	Score
1.	Desa masih bergantung pada Dana Pusat untuk menjalankan program pembangunan.	0.10	3.97	0.41
2.	Kondisi geografis yang sulit memengaruhi pelaksanaan proyek fisik.	0.09	3.65	0.34
3.	Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menyebabkan hambatan.	0.10	3.90	0.39

4. Konflik kepentingan sering muncul dalam penentuan prioritas program desa.	0.10	3.73	0.36
5. Distribusi bahan pembangunan sering terlambat karena keterbatasan akses transportasi.	0.10	3.70	0.35
Total Faktor Ancaman	0.49	3.79	1.85
Total Faktor Eksternal			3.88

Sumber; Data diolah, 2025

Matriks EFAS digunakan untuk mengevaluasi respons pemerintah desa terhadap peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa. Berikut adalah penjelasan naratif akademik untuk masing-masing faktor:

- 1) Pendampingan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Dana Desa Indikator ini memosisikan peran pemerintah pusat sebagai pilar pendukung eksternal yang krusial. Memiliki bobot sebesar 0,10, faktor ini dianggap sebagai elemen penting dalam menjamin efektivitas tata kelola. Dengan perolehan *rating* sebesar 3,95, terlihat bahwa pendampingan teknis ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. Kontribusi skor sebesar 0,40 menunjukkan bahwa peluang ini sangat signifikan dalam memperkuat transparansi dan kemampuan desa dalam mengelola anggaran secara akuntabel.
- 2) Pengembangan BUMDes untuk Kemandirian Ekonomi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan peluang strategis dengan bobot tertinggi, yaitu 0,11, yang menandakan urgensi faktor ini terhadap penguatan ekonomi lokal. Perolehan *rating* sebesar 4,18 menunjukkan bahwa BUMDes dipandang sebagai instrumen yang sangat berpengaruh dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi. Skor akhir sebesar 0,45 menetapkan faktor ini sebagai peluang utama (skor tertinggi) yang harus dioptimalkan untuk mendorong kemandirian fiskal desa di masa depan.
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Siskeudes Digitalisasi melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan peluang adaptasi teknologi dengan bobot 0,09. Perolehan *rating* sebesar 3,63 mengindikasikan bahwa implementasi sistem informasi ini memiliki dampak signifikan terhadap akurasi dan transparansi laporan keuangan. Skor sebesar 0,34 merefleksikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi peluang penting dalam meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan kepercayaan publik melalui sistem pelaporan yang lebih terstandarisasi.
- 4) Potensi Ekonomi Lokal Sektor Pertanian dan Perikanan Sektor ekonomi primer berbasis potensi lokal memiliki bobot kepentingan sebesar 0,10. Dengan perolehan *rating* sebesar 4,00, indikator ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam setempat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap prospek kesejahteraan masyarakat. Kontribusi skor sebesar 0,41 menegaskan bahwa integrasi program Dana Desa dengan sektor pertanian dan perikanan merupakan strategi peluang yang konkret untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat desa.
- 5) Dukungan Sosial Masyarakat terhadap Program Dana Desa Aspek modal sosial berupa dukungan warga memiliki bobot kepentingan sebesar 0,10. Perolehan *rating* yang tinggi sebesar 4,02 mencerminkan antusiasme serta partisipasi aktif masyarakat sebagai faktor eksternal pendukung yang sangat kuat. Skor akhir sebesar 0,42 membuktikan bahwa legitimasi

- dan dukungan masyarakat menjadi peluang nyata yang mempermudah implementasi program-program pembangunan di lapangan agar berjalan lebih lancar dan efektif.
- 6) Ketergantungan Fiskal terhadap Dana Pusat Ketergantungan terhadap alokasi anggaran dari pusat merupakan ancaman struktural dengan bobot sebesar 0,10. Perolehan *rating* sebesar 3,97 menunjukkan bahwa faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap fleksibilitas program desa. Skor sebesar 0,41 merepresentasikan risiko ketidakpastian; apabila terjadi perubahan kebijakan atau keterlambatan pencairan dari pusat, maka stabilitas program pembangunan desa akan terganggu secara langsung.
 - 7) Hambatan Geografis dalam Pelaksanaan Proyek Fisik Kondisi geografis wilayah yang menantang memiliki bobot kepentingan sedang sebesar 0,09. Dengan *rating* sebesar 3,65, faktor alam ini secara nyata menjadi hambatan eksternal dalam pembangunan infrastruktur fisik. Skor sebesar 0,34 mengindikasikan bahwa kendala geografis memberikan pengaruh negatif yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan biaya logistik dan potensi keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan di area-area yang sulit dijangkau.
 - 8) Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga Desa (Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat) Faktor koordinasi memiliki bobot kepentingan tinggi sebesar 0,10 karena fungsinya sebagai motor penggerak organisasi. Perolehan *rating* sebesar 3,90 menunjukkan bahwa disparitas komunikasi antar-lembaga merupakan ancaman serius bagi efisiensi birokrasi. Skor sebesar 0,39 menggambarkan kontribusi negatif yang cukup besar terhadap kelancaran program; jika sinergitas antar-lembaga ini tidak segera diperbaiki, maka target-target pembangunan sulit dicapai secara kolektif.
 - 9) Konflik Kepentingan dalam Penentuan Prioritas Program Konflik kepentingan antar-pihak dalam pengambilan keputusan memiliki bobot sebesar 0,10. Perolehan *rating* sebesar 3,73 menunjukkan bahwa ancaman ini sering muncul dan mengganggu objektivitas penetapan program prioritas. Skor sebesar 0,36 mencerminkan bahwa intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat melemahkan integritas proses perencanaan desa, sehingga alokasi Dana Desa berisiko menjadi tidak tepat sasaran.
 - 10) Hambatan Logistik dan Distribusi Bahan Pembangunan Keterbatasan akses transportasi bagi distribusi material memiliki bobot kepentingan sebesar 0,10. Perolehan *rating* sebesar 3,70 menegaskan bahwa hambatan logistik ini memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas waktu pelaksanaan proyek di lapangan. Skor akhir sebesar 0,35 menunjukkan bahwa keterlambatan suplai bahan bangunan merupakan ancaman operasional yang dapat mengakibatkan pembengkakan anggaran dan ketidaktercapaian target fisik tepat waktu.

2. Matriks Internal dan Eksternal (IE)



Gambar 1. Matriks Internal dan Eksternal

Berdasarkan analisis Matriks Internal-Eksternal (IE), yang memetakan posisi strategis berdasarkan total skor Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE), objek penelitian ini menempati posisi yang sangat ideal. Skor total IFE sebesar 3,74 dan skor total EFE sebesar 3,88, keduanya berada dalam kategori kuat (rentang 3,0–4,0). Kombinasi ini menempatkan objek penelitian pada Kuadran I dalam matriks IE, yang merepresentasikan kondisi dimana kekuatan internal yang dominan bertemu dengan lingkungan eksternal yang penuh peluang dan dapat dikelola dengan baik.

Posisi di Kuadran I ini mengindikasikan bahwa objek penelitian memiliki daya saing tinggi dan berada dalam posisi strategis terbaik untuk pengembangan. Dengan kapasitas internal yang solid dan respons yang efektif terhadap faktor eksternal, strategi utama yang direkomendasikan adalah *Growth and Build* (Tumbuh dan Kembang). Strategi ini berfokus pada ekspansi proaktif dan penguatan daya saing, yang dapat diimplementasikan melalui perluasan cakupan layanan, peningkatan kualitas dan promosi, modernisasi tata kelola, serta optimalisasi peluang eksternal seperti dukungan kebijakan dan tren pasar.

Secara keseluruhan, pemetaan IE menyimpulkan bahwa objek penelitian memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Pemanfaatan kekuatan internal secara maksimal untuk merespons dan memanfaatkan peluang eksternal akan memungkinkan objek penelitian untuk menjadi entitas yang unggul, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Prayudi & Yulistria, 2020).

3. Positioning Kuadran SWOT

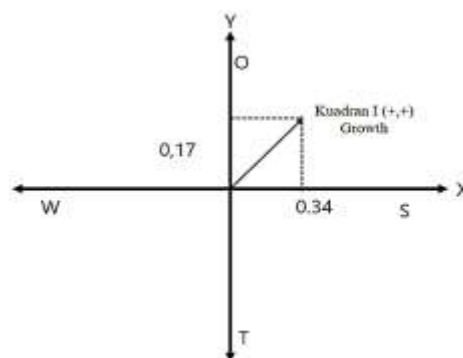
Setelah sebelumnya membahas tentang IFAS dan EFAS, maka selanjutnya akan ditentukan posisi kondisi Penelitian. Berdasarkan matriks IFAS, dapat diketahui bahwa posisi sumbu X dengan rumus:

$$X = \text{Total kekuatan} - \text{Total kelemahan} = 2,04 - 1,70 = 0,34$$

Sedangkan untuk matriks EFAS, dapat diketahui posisi sumbu Y adalah

$$Y = \text{Total peluang} - \text{Total Ancaman} = 2,02 - 1,85 = 0,17$$

Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS tersebut, maka posisi pada kuadran SWOT adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Positioning Kuadran SWOT

Berdasarkan hasil analisis positioning kuadran SWOT, objek penelitian berada pada Kuadran I (Strengths–Opportunities), yang menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih dominan dibandingkan kelemahan, dan pada saat yang sama terdapat peluang eksternal yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa entitas penelitian memiliki kapasitas internal yang kuat, seperti tata kelola program yang baik, dukungan masyarakat, dan optimalisasi sumber daya lokal, sehingga mampu merespons peluang yang tersedia secara efektif.

Peluang tersebut meliputi dukungan pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan, serta potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan. Kombinasi kekuatan internal dan peluang eksternal ini memberikan landasan yang solid untuk memperkuat posisi objek penelitian dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Posisi ini menunjukkan bahwa harapan peneliti untuk menempatkan objek penelitian pada Kuadran I (Strengths–Opportunities) telah tercapai, karena kekuatan internal terbukti lebih besar dibandingkan kelemahan yang ada. Dalam situasi ini, strategi yang diperlukan adalah strategi agresif yang berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang secara optimal. Dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki, seperti partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga desa, serta pemanfaatan sumber daya peluang yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mendorong pengembangan lebih lanjut.

Kekuatan internal yang dominan menjadikan objek penelitian berada pada posisi yang menguntungkan. Berbagai faktor seperti pengelolaan program yang efektif, pemanfaatan teknologi, serta dukungan aparat dan masyarakat menjadi modal strategis untuk meningkatkan daya saing. Apabila potensi ini terus dikembangkan, objek penelitian memiliki kemungkinan besar untuk tampil lebih unggul dibandingkan entitas lain di sekitarnya. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan dan pengembangan menjadi pendekatan yang paling relevan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan daya tarik objek penelitian tersebut (Hasbiah et al., 2023).

4. Analisis Matriks SWOT

Tabel 5. SWOT

		IFAS	Strength (kekuatan)	Weaknesses (kelemahan)
EFAS			S1. Pemerintah Desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam penggunaan Dana Desa.	W1. Aparatur desa masih kurang memahami regulasi penggunaan Dana Desa.
			S2. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah membantu kelancaran pelaksanaan program Dana Desa.	W2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa masih lemah.
			S3. Dana Desa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	W3. Masyarakat jarang dilibatkan dalam musyawarah perencanaan desa.
			S4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cukup tinggi.	W4. Transparansi keuangan desa masih rendah.
			S5. Potensi sumber daya alam desa telah dimanfaatkan dengan baik melalui program Dana Desa.	W5. Data dan laporan penggunaan Dana Desa belum lengkap dan akurat.
		Opportunities (peluang)	SO	WO
	O1.	Pemerintah pusat memberikan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa.	1. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam Desa yang telah dimanfaatkan dengan baik melalui program Dana Desa secara berkelanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat. (S5,O4).	1. Aparatur Desa masih kurang memahami regulasi penggunaan Dana Desa yang dimana pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa. (W1, O1).
	O2.	Pengembangan BUMDes dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa.	2. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program Dana Desa dalam	2. Transparansi keuangan Desa masih rendah karena dengan Teknologi informasi (Siskeudes) dapat membantu transparansi keuangan Desa. (W4, O3).
	O3.	Teknologi informasi (Siskeudes)		

	membantu transparansi keuangan desa.	pelaksanaan pembangunan cukup tinggi.(S4, O5).	
O4.	Potensi ekonomi lokal (pertanian, perikanan) mendukung kesejahteraan masyarakat.		
O5.	Dukungan masyarakat terhadap program Dana Desa cukup tinggi.		
Threats (ancaman)		ST	WT
T1.	Desa masih bergantung pada Dana Pusat untuk menjalankan program pembangunan.	1. Dukungan Dari pemerintah pusat atau Dana pusat dapat membantu kelancaran menjalankan program pembangun Desa. (S2,T1)	1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, guna meminimalkan risiko keterlambatan program akibat perubahan kebijakan atau penyaluran anggaran dari pemerintah pusat. (W1, T1).
T2.	Kondisi geografis yang sulit memengaruhi pelaksanaan proyek fisik.	2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan Adanya koordinasi antara pemerintah desa ,BPD, dan masyarakat bisa menjadi solusi dalam pelaksanaan pembangunan cukup tinggi. (S4, T3).	2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa untuk memastikan keputusan pembangunan lebih objektif serta mengurangi potensi konflik kepentingan dalam penentuan prioritas program.(W3,T4).
T3.	Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menyebabkan hambatan.		
T4.	Konflik kepentingan sering muncul dalam penentuan prioritas program desa.		
T5.	Distribusi bahan pembangunan sering terlambat karena keterbatasan akses transportasi.		

Sumber; Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel analisis SWOT di atas, berikut adalah uraian komprehensif mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi prioritas penggunaan Dana Desa, serta formulasi strategi yang relevan.

a. Analisis Kekuatan (Strengths) sebagai Modalitas Internal

Analisis terhadap lingkungan internal menunjukkan bahwa desa memiliki sejumlah kekuatan fundamental yang menjadi modalitas utama dalam pengelolaan Dana Desa. Kekuatan ini bersumber dari aspek legalitas, di mana Pemerintah Desa memiliki dasar hukum yang kokoh dan kerangka regulasi yang jelas, sehingga memberikan kepastian dalam perencanaan serta meminimalkan risiko penyimpangan administratif. Stabilitas ini diperkuat oleh dukungan vertikal dari pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan intensif yang menjamin akuntabilitas

program. Dari sisi implementasi, pengalokasian Dana Desa telah dilakukan berbasis kebutuhan riil masyarakat (needs-based approach), yang berdampak langsung pada ketepatan sasaran program. Selain itu, modal sosial berupa partisipasi masyarakat yang tinggi turut memperkuat efektivitas program melalui rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat, sementara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang telah berjalan optimal menjadi pilar pendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi desa.

b. Analisis Kelemahan (Weaknesses) sebagai Hambatan Struktural

Meskipun memiliki kekuatan yang signifikan, efektivitas pengelolaan Dana Desa masih menghadapi sejumlah kelemahan struktural yang memerlukan intervensi serius. Kendala utama terletak pada kapasitas aparatur desa yang masih terbatas dalam memahami kompleksitas regulasi, yang berimplikasi pada ketidakmaksimalan proses administrasi. Kelemahan ini diperburuk oleh mekanisme pengawasan internal yang belum optimal, sehingga meningkatkan potensi inefisiensi dan kesalahan prosedur. Di sisi lain, aspek partisipatif dalam musyawarah perencanaan desa masih minim, yang berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan program prioritas. Isu transparansi keuangan dan akurasi data pelaporan juga menjadi sorotan, di mana keterbatasan dalam pencatatan administrasi dan keterbukaan informasi dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah desa.

c. Analisis Peluang (Opportunities) sebagai Akselerator Pembangunan

Lingkungan eksternal menawarkan berbagai peluang strategis yang dapat dikapitalisasi untuk meningkatkan kinerja pembangunan desa. Kebijakan pendampingan dari pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan tata kelola anggaran. Secara ekonomi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan potensi sektor primer lokal—seperti pertanian dan perikanan—menjadi peluang besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Peluang ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi, khususnya penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang dapat menjadi solusi atas masalah transparansi dan akurasi data. Selain itu, tingginya antusiasme dan dukungan sosial masyarakat terhadap program desa menjadi katalisator penting yang dapat mempermudah eksekusi program-program pembangunan di lapangan.

d. Analisis Ancaman (Threats) sebagai Risiko Eksternal

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari berbagai ancaman eksternal yang berpotensi mendisrupsi jalannya program. Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat menempatkan desa pada posisi rentan terhadap fluktuasi kebijakan atau keterlambatan pencairan anggaran. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur transportasi juga menjadi hambatan logistik yang sering kali menyebabkan keterlambatan distribusi material pembangunan. Selain kendala fisik, tantangan non-teknis seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga desa serta potensi konflik kepentingan dalam penentuan prioritas program sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan strategis, sehingga efektivitas pembangunan menjadi terhambat.

Formulasi Strategi Prioritas (Sintesis SWOT), berdasarkan pemetaan faktor-faktor di atas, dirumuskan strategi integratif sebagai berikut:

a. Strategi Agresif (SO - Strength-Opportunities)

Strategi ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal secara maksimal. Implementasinya dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mengonversi tingginya partisipasi sosial masyarakat menjadi dukungan nyata dalam memperkuat implementasi program-program strategis Dana Desa.

b. Strategi Diversifikasi (WO - Weakness-Opportunities)

Strategi ini bertujuan meminimalkan kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada. Langkah konkretnya meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program pendampingan intensif dari pemerintah pusat untuk memperdalam pemahaman regulasi. Selain itu, kelemahan dalam transparansi keuangan diatasi melalui adopsi teknologi informasi (Siskeudes) guna menjamin akurasi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

c. Strategi Defensif (ST - Strength-Threats)

Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk memitigasi dampak ancaman eksternal. Pendekatan yang dilakukan adalah memaksimalkan dukungan pemerintah pusat secara taktis untuk mengatasi risiko ketergantungan fiskal, serta memperkuat koordinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat guna mereduksi potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat penentuan prioritas program.

d. Strategi Bertahan (WT - Weakness-Threats)

Strategi ini bersifat preventif, bertujuan mengurangi kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan untuk mencegah risiko administratif akibat dinamisnya kebijakan pusat. Di saat yang sama, pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa didorong secara masif untuk menjamin objektivitas keputusan dan mencegah konflik kepentingan di tengah keterbatasan yang ada.

Melalui penerapan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat (Hassandi et al., 2024).

5. Analisis Data dan Pembahasan Strategi

Tabel 6. Nilai TAS (Total Attractiveness Score) Alternatif Strategi

Kode	Alternatif Strategi	TAS	PRIORITAS
SO1	Mengoptimalkan potensi sumber daya alam Desa yang telah dimanfaatkan dengan baik melalui program Dana Desa secara berkelanjutan serta mendukung kesejahteraan masyarakat. (S5,O4)	0.72	5
SO2	Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan cukup tinggi. (S4, O5)	0.82	2
WO1	Aparatur Desa masih kurang memahami regulasi penggunaan Dana Desa yang dimana pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa. (W1, O1)	0.72	5
WO2	Transparansi keuangan Desa masih rendah karena dengan Teknologi informasi (Siskeudes) dapat membantu transparansi keuangan Desa. (W4, O3)	0.69	6
ST1	Dukungan Dari pemerintah pusat atau Dana pusat dapat membantu kelancaran menjalankan program pembangun Desa. (S2,T1)	0.88	1
ST2	Meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa ,BPD, dan masyarakat bisa menjadi solusi dalam pelaksanaan pembangunan cukup tinggi. (S4, T3)	0.79	3
WT1	Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, guna meminimalkan risiko keterlambatan program akibat perubahan kebijakan atau penyaluran anggaran dari pemerintah pusat. (W1, T1)	0.73	4
WT2	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa untuk memastikan keputusan pembangunan lebih objektif serta mengurangi potensi konflik kepentingan dalam penentuan prioritas program. (W3,T4)	0.69	6

Sumber; Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan *Total Attractiveness Score* (TAS), teridentifikasi tiga strategi yang memiliki nilai prioritas tertinggi dan dinilai paling relevan untuk pengembangan pengelolaan Dana Desa. Ketiga strategi ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa. Adapun urutan prioritas strategi tersebut meliputi strategi ST1 sebagai prioritas utama, diikuti oleh strategi SO2 sebagai prioritas kedua, dan strategi ST2 sebagai prioritas ketiga.

a. Strategi ST1 (Prioritas 1): Optimalisasi Dukungan Pemerintah Pusat

Deskripsi Strategi Strategi prioritas pertama berfokus pada upaya mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat atau pemanfaatan Dana Pusat guna menjamin kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa. Pemilihan strategi ini didasarkan pada fakta bahwa dukungan pusat merupakan fondasi krusial bagi keberlangsungan program Dana Desa, mengingat ketergantungan desa terhadap sumber pendanaan ini masih cukup tinggi. Strategi ini sangat relevan untuk memitigasi risiko keterlambatan pembangunan yang sering kali disebabkan oleh perubahan kebijakan anggaran atau prosedur administrasi di tingkat pusat. Dukungan yang diharapkan tidak semata-mata bersifat finansial, melainkan juga mencakup aspek pendampingan, supervisi, dan kejelasan regulasi yang memungkinkan desa menjalankan program secara efektif dan terarah. Lebih jauh, strategi ini berperan vital dalam mengatasi hambatan eksternal seperti kondisi geografis yang sulit serta kendala distribusi material pembangunan.

Solusi Implementatif:

- 1) Koordinasi Pemerintah Langkah operasional pertama dalam strategi ini adalah penguatan koordinasi pemerintah melalui komunikasi rutin dan konsultasi reguler antara pemerintah desa dengan kementerian terkait. Upaya ini esensial untuk memastikan keselarasan kebijakan dan kelancaran proses penganggaran. Koordinasi yang efektif antarlevel pemerintahan diakui sebagai faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik serta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel (Keban, 2014). Hal ini juga selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan urgensi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah guna menjamin tertib administrasi dalam penyaluran Dana Desa.
- 2) Administrasi dan Pelaporan Aspek kedua adalah penguatan administrasi dan pelaporan, yang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat serta optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penyusunan laporan yang presisi dan sesuai regulasi sangat krusial untuk mempercepat proses pencairan Dana Desa melalui mekanisme verifikasi yang lancar, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di sisi lain, penggunaan Siskeudes oleh Desa Lunnyuk Rea bertujuan untuk menstandarisasi proses perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan guna meningkatkan transparansi, sesuai dengan standar yang dikembangkan oleh BPKP dan regulasi yang berlaku.
- 3) Pendampingan Teknis Aspek ketiga melibatkan pemanfaatan pendampingan teknis dari pendamping desa dan tenaga ahli. Kehadiran tenaga pendamping sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan prosedur pembangunan yang sesuai dengan regulasi. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa yang menempatkan pendamping desa sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pentingnya peran pendampingan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020.

b. Strategi SO2 (Prioritas 2): Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Deskripsi Strategi Strategi prioritas kedua adalah meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Strategi ini dipilih karena partisipasi masyarakat merupakan kekuatan internal (strength) yang signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi program Dana Desa. Dukungan masyarakat yang tinggi menjadi peluang besar untuk mengakselerasi pembangunan dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan riil warga. Partisipasi aktif juga berfungsi menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap keberlanjutan program, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi kegiatan pembangunan.

Solusi Implementatif:

- 1) Musyawarah Desa Implementasi strategi ini diawali dengan optimalisasi musyawarah desa sebagai forum perencanaan dan evaluasi yang partisipatif. Meskipun telah dilaksanakan di Desa Lunyuk Rea, kualitas dan kuantitas partisipasi warga dalam memberikan masukan kritis perlu ditingkatkan agar keputusan yang diambil lebih objektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein (1969), partisipasi masyarakat adalah elemen fundamental dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini diperkuat oleh Cohen dan Uphoff (1980) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi akan secara signifikan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Langkah selanjutnya adalah program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan yang berbasis pada potensi lokal, seperti sektor pertanian dan peternakan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan produktivitas warga guna mendorong kemandirian ekonomi desa. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pembangunan partisipatif yang menekankan pengembangan kapasitas lokal melalui pemberdayaan (Chambers, 1997). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga secara eksplisit menekankan pentingnya pengembangan potensi masyarakat sebagai jalan menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.
- 3) Kolaborasi Kelompok Kerja Solusi ketiga adalah penguatan kolaborasi dengan membentuk dan mengoptimalkan kelompok kerja masyarakat untuk mendukung pembangunan fisik maupun nonfisik. Berbagai elemen seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kelompok tani, Karang Taruna, hingga perangkat RT/RW memiliki peran strategis dalam pelaksanaan teknis, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga pengawasan kualitas pekerjaan. Pelibatan aktif kelompok-kelompok ini merupakan manifestasi dari prinsip partisipasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2018).

c. Strategi ST2 (Prioritas 3): Penguatan Koordinasi Kelembagaan

Deskripsi Strategi Strategi prioritas ketiga difokuskan pada peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Strategi ini menjadi prioritas karena lemahnya koordinasi diidentifikasi sebagai ancaman serius yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Dengan memperkuat koordinasi, desa dapat memitigasi risiko konflik kepentingan, kesalahpahaman, serta hambatan komunikasi lainnya. Sinergi yang terbangun antar-pemangku kepentingan akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, kualitas pengambilan keputusan, serta meminimalkan kesalahan dalam penentuan prioritas pembangunan.

Solusi Implementatif:

- 1) Forum Komunikasi Langkah konkret pertama adalah pembentukan forum komunikasi yang mewadahi pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda. Forum ini berfungsi sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi kepentingan untuk memastikan pembangunan berjalan partisipatif dan akuntabel. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta didukung oleh teori Cohen & Uphoff (1980) yang menekankan bahwa partisipasi multipihak dalam perencanaan dan evaluasi adalah kunci agar program pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.
- 2) Rapat Evaluasi Rutin Selanjutnya, pelaksanaan rapat evaluasi rutin setiap tiga bulan sekali menjadi instrumen vital untuk memantau progres dan mengidentifikasi hambatan pembangunan. Evaluasi berkala memungkinkan perumusan langkah perbaikan yang cepat dan terukur. Mekanisme ini merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pentingnya evaluasi partisipatif ini juga didukung oleh temuan Cohen dan Uphoff (1980) yang menyatakan bahwa evaluasi rutin dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan desa secara keseluruhan.
- 3) Pengawasan Bersama Solusi terakhir adalah peningkatan pengawasan partisipatif di mana setiap elemen masyarakat berperan aktif memastikan pembangunan sesuai rencana. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui penyediaan kotak saran, forum warga, transparansi informasi, hingga pembentukan tim pengawas partisipatif yang melibatkan pemuda dan perempuan. Pendekatan pengawasan ini konsisten dengan prinsip pembangunan partisipatif (Arnstein, 1969; Cohen & Uphoff, 1980) dan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan keterlibatan masyarakat luas untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Strategi Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk*, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Lunyuk Rea memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis faktor internal melalui matriks IFAS menunjukkan bahwa Desa Lunyuk Rea berada pada kategori kuat. Kondisi ini ditunjukkan oleh adanya dasar hukum yang kuat, dukungan pemerintah pusat dan daerah, kesesuaian alokasi Dana Desa dengan kebutuhan desa, serta partisipasi masyarakat yang relatif baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu

diperhatikan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan desa, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Sementara itu, hasil analisis faktor eksternal melalui matriks EFAS menunjukkan bahwa Desa Lunyuk Rea memiliki peluang yang besar dalam pengelolaan Dana Desa, yang tercermin dari tingginya dukungan kebijakan pemerintah, peluang pengembangan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, desa juga menghadapi sejumlah ancaman, seperti konflik kepentingan dalam penentuan prioritas program, keterbatasan akses transportasi yang menghambat distribusi material pembangunan, serta ketergantungan desa terhadap Dana Desa sebagai sumber pendapatan utama. Berdasarkan hasil analisis matriks Internal-Eksternal (IE), posisi Desa Lunyuk Rea berada pada kuadran tumbuh dan berkembang (growth and build), yang menunjukkan bahwa desa memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang cukup besar untuk dikembangkan.

Hasil analisis SWOT yang diprioritaskan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) menunjukkan bahwa strategi yang paling tepat diterapkan adalah strategi agresif (SO), yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan internal desa untuk menangkap peluang eksternal secara optimal. Strategi tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Penerapan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, mendorong kemandirian ekonomi desa, serta mewujudkan pembangunan Desa Lunyuk Rea yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Dampaknya terhadap Produktivitas Pertanian*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023a). *Statistik Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2018). *Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development, 8(3), 213–235.
- Fitriyani. (2022). *Pengaruh Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat*. Skripsi. Universitas Teknologi Sumbawa.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Laksmi, A. P., & Zunaidi, R. A. (2024). Organizational Strategy Analysis. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258.
- Nurdin. (2023). Strategi Peningkatan Efektivitas Dana Desa melalui Analisis SWOT (Studi Kasus di Desa Moyo Hulu). Skripsi. Universitas Mataram.
- Pratama, R. (2020). Analisis Strategi Prioritas Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 55–67.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahman, & Putri. (2022). Strategi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 121–130.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendampingan Masyarakat Desa*.
- Santoso, B. (2018). *Perencanaan dan Strategi Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smoke, P. (2019). *Fiscal Decentralization and Good Governance: Lessons for the Next Decade*. UNDP Policy Paper. New York: United Nations Development Programme.
- Sugiiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, R. (2012). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- World Bank. (2020). *Community-Driven Development and Rural Poverty Reduction: Indonesia Case Study*. Washington, D.C.: The World Bank.